

© 2004 Togap M Hutagalung  
Makalah pribadi  
Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702)  
Sekolah Pasca Sarjana / S3  
Institut Pertanian Bogor  
Mei 2004

Posted 31 May 2004

Dosen: Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng

# **AGROPOLITAN MERUPAKAN ALTERNATIF PEMBANGUNAN PERDESAAN BERKELANJUTAN**

Oleh:

**Togap M Hutagalung**  
P062034054/PSL  
[togp@plasa.com](mailto:togp@plasa.com)

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan undang undang No. 5 tahun 1979 kawasan perdesaan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Perbedaan kawasan perdesaan (*rura area*) dan kawasan perkotaan (*urban area*) adalah kepadatan penduduknya yang lebih rendah, persentase rumahtangga pertanian yang lebih tinggi, akses ke fasilitas telepon, listrik, kepemilikan TV, jarak ke SMU, waktu tempuh ke perkotaan dsb secara umum lebih buruk dari wilayah kota.

Faktor penentu perbedaan yang menonjol diantara faktor-faktor pembeda di atas adalah kepadatan penduduk yang rendah dan dominasi sektor pertanian. Hingga tahun 2000, kawasan pedesaan merupakan kawasan tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk tahun 2000

menggambarkan 58 persen penduduk Indonesia bermukim di kawasan pedesaan. Bahkan di pulau-pulau besar kawasan Timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku dan Papua jumlah penduduk yang bermukim di pedesaan masih berada diatas 70 persen. Memang terjadi kecenderungan penurunan persentase penduduk pedesaan dari tahun ke tahun. Namun demikian, dalam angka absolut terjadi penambahan jumlah penduduk pedesaan terutama di pulau pulau besar Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Hal ini terlihat dari angka laju pertumbuhan penduduk yang masih positif. Indikator kependudukan di pulau-pulau besar Indonesia pada tahun 2000 disarikan dalam **Tabel 1** di bawah ini.

**Tabel 1** Indikator Kependudukan tahun 2000 berdasarkan wilayah

Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Persentase Penduduk Perdesaan	Laju Pertumbuhan Penduduk Perdesaan
	(x 1000 )	per km2)	(%)	(%)
<b>SUMATERA</b>	<b>43269</b>	<b>90</b>	<b>66</b>	<b>0,5</b>
<b>JAWA</b>	<b>121293</b>	<b>951</b>	<b>51</b>	<b>-1,1</b>
<b>BALI dan NUSA TENGGARA</b>	<b>10982</b>	<b>150</b>	<b>67</b>	<b>-0,4</b>
<b>KALIMANTAN</b>	<b>11307</b>	<b>20</b>	<b>65</b>	<b>1,0</b>
<b>SULAWESI</b>	<b>14881</b>	<b>78</b>	<b>72</b>	<b>1,0</b>
<b>MALUKU dan PAPUA</b>	<b>4109</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>1,8</b>
<b>I N D O N E S I A</b>	<b>205841</b>	<b>109</b>	<b>58</b>	<b>-0,3</b>

*sumber: diolah dari data BPS*

Indikator kependudukan lebih lengkap di masing-masing provinsi disajikan dalam tabel 1.2.

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa sebagian besar penduduk terkonsentrasi di pedesaan, hal ini merupakan potensi dan sekaligus permasalahan bagi pembangunan:

1. Dari sisi produksi, desa menjadi penyedia sumberdaya manusia yang merupakan faktor produksi utama selain teknologi dan modal.
2. Kedua, dari sisi konsumsi, penduduk yang besar sekaligus merupakan potensi pasar bagi produk-produk komersial.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Kesenjangan Peran-Kenyataan Perdesaan dalam Perekonomian dan Masyarakat.**

Secara umum Kasawan perdesaaan identik dengan pertanian, mengandung peran ekonomi maupun kemasyarakatan yang sangat penting yang hingga kini belum dapat terpecahkan dan terealisasi secara baik dan menyeluruh.

Peran yang terkandung dalam kawasan perdesaaan tersebut adalah:

1. penjamin ketersediaan pangan untuk mencapai keamanan pangan nasional, penyedia bahan mentah bagi industri, sekaligus penyedia lapangan kerja, pemberi sumbangan pada pendapatan nasional baik melalui pendapatan lokal maupun ekspor.
2. Kawasan perdesaaan *de facto* masih harus mengemban tugas sebagai penjamin kelestarian sumberdaya dan lingkungan dan pengembang kultur daerah dalam menjaga kelestarian kebudayaan nasional

**Tabel 2. Indikator Kependudukan tahun 2000 berdasarkan Propinsi**

	Propinsi	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Persentase Penduduk Perdesaan	Laju Pertumbuhan Penduduk Perdesaan
		(x 1000)	Per km2	(%)	(%)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	3929	76	76	-0,1
2	Sumatera Utara	11642	158	58	0,1
3	Sumatera Barat	4249	99	71	-0,6
4	Riau	4948	52	56	2,2
5	Jambi	2407	45	72	0,8
6	Sumatera Selatan	8899	74	66	1,5
7	Bengkulu	1564	79	71	1,6
8	Lampung	6731	190	79	0,1
9	Kep. Bangka Belitung	900	56	57	
10	DKI Jakarta	18361	12592	0	0,0
11	Jawa Barat	35724	1033	50	-0,8
12	Jawa Tengah	31223	959	60	-1,1
13	D. I. Yogyakarta	3121	980	42	-2,0
14	Jawa Timur	34766	725	59	-1,4
15	Banten	8098	936	48	-
16	Bali	3150	559	50	-2,5
17	Nusa Tenggara Barat	4009	4009	65	-0,7
18	Nusa Tenggara Timur	3823	199	84	1,1
19	Kalimantan Barat	4016	27	75	1,5
20	Kalimantan Tengah	1855	12	73	1,6
21	Kalimantan Selatan	2984	69	64	0,0
22	Kalimantan Timur	2452	11	42	0,8
23	Sulawesi Utara	2001	131	63	-0,8
24	Sulawesi Tengah	2176	34	80	2,1
25	Sulawesi Selatan	8051	129	71	0,8
26	Sulawesi Tenggara	1820	48	79	2,6
27	Gorontalo	833	68	75	
28	Maluku	1163	25	74	-0,8
29	Maluku Utara	732	24	71	
30	Papua	2214	6	78	3,4

**Sumber: diolah dari data BPS**

Dalam kaitannya dengan proses produksi pangan dan bahan mentah, kawasan pedesaan merupakan konsumen bagi produk sarana produksi pertanian, produk investasi dan jasa produksi dan sekaligus sebagai pemasok bahan mentah untuk industri pengolah atau penghasil produk akhir.

Dengan cabang kegiatan ekonomi lain di depan (sektor hulu) dan dibelakangnya (sektor hilir) sektor pertanian pedesaan seharusnya terikat erat dalam apa yang disebut sebagai sistem agribisnis.

Dalam perspektif agribisnis, sektor hulu seharusnya terdiri dari:

3. Perusahaan jasa penelitian,
4. Perusahaan benih dan pemuliaan,
5. Industri pakan, mesin pertanian, bahan pengendali hama dan penyakit, dan
6. Industri pupuk, lembaga penyewaan mesin dan alat alat pertanian, jasa pergudangan,
7. Perusahaan bangunan pertanian dan asuransi, agen periklanan pertanian, mass-media pertanian, serta
8. Jasa konsultasi ilmu pertanian.
9. Pandangan yang lebih maju mengharuskan adanya jasa jaminan kesehatan dan hari tua pelaku usahatani oleh koperasi petani atau lembaga yang sejenis.

Karena tingginya intensitas keterlibatan sektor perdagangan, maka di sektor hulu ini perlu juga diperhatikan peran dan fungsi organisasi dagang seperti pedagang besar, pedagang ritel, serta jasa perantara.

Sektor hilir agribisnis mencakup:

1. Industri manufaktur makanan,
2. Industri makanan dan hotel,
3. Restoran dan toko-toko pengolah sekaligus penjual makanan.

Melihat perannya yang begitu penting, kawasan pedesaan sebagai lokasi usaha tani menghadapi permasalahan:

1. Sebagai pemasok hasil pertanian, sektor usahatani menghasilkan produk produk pertanian dengan elastisitas penawaran yang rendah. Ini berarti bahwa perubahan harga produk yang terjadi di tingkat eceran direspon lambat oleh sektor usahatani. Ini menyebabkan kawasan perdesaan kurang bisa mengoptimalkan peluang pasar secara tepat waktu.
2. Sudah menjadi ciri khas produk pertanian juga bahwa bagian harga akhir yang diterima petani sangat rendah. Ini disebabkan rendahnya peran penciptaan nilai tambah oleh pelaku usahatani terhadap produk produk akhirnya. Karena rendahnya bagian harga yang diterima kawasan perdesaan, rendah juga penerimaan, yang lebih lanjut menyebabkan rendahnya pendapatan bersih usahatani. Akibatnya, adalah sulit diharapkan terjadinya pemupukan modal yang terjadi dari dalam masyarakat perdesaan sendiri. Rendahnya pemupukan modal menyebabkan rendahnya investasi masyarakat.

### **1.3 Agropolitan sebagai Alternatif**

Sementara ini, pemerintah telah berupaya memecahkan daya beli perdesaan dengan berbagai pendekatan baik yang berupa kebijakan harga maupun non harga. Berbagai skim kebijakan untuk merealisasikan campur tangan ini sudah dijalankan dari yang bersifat parsial, maupun yang bersifat komprehensif dalam bentuk program pembangunan perdesaan terpadu.

Namun, kalau semuanya diukur dengan indikator dampak pembangunan, - misalnya dalam bentuk peningkatan pendapatan riil per rumah tangga, peningkatan indeks kualitas hidup, harus diakui bahwa upaya upaya dimaksud masih belum mampu menjawab permasalahan peningkatan kesejahteraan perdesaan secara nyata. Klaim ini diperkuat oleh kenyataan bahwa lebih dari 70 % rakyat kita hidup di perdesaan, sekitar 50 % dari total angkatan kerja nasional menggantungkan nasibnya bekerja di sektor pertanian, dan 80 % dari rakyat hanya mengenyam pendidikan formal tertinggi setingkat sekolah dasar (SD) dan kesenjangan produktivitas antar sektor pertanian dengan industri semakin menganga lebar. Pada tahun 1971 rasio produktivitas sektor pertanian terhadap industri masih sekitar 0,45 tahun 1985 turun menjadi 0,33 dan tahun 1997 menjadi hanya 0,20 (BPS, 1999). Kesenjangan produktivitas tersebut diikuti dengan kesenjangan antar golongan rumah tangga, kesenjangan pendapatan per kapita antara desa dan kota, dan lain-lain. Kenyataan yang terjadi menegaskan bahwa pembangunan hanya terarah pada kawasan perkotaan dengan berbagai akses yang disebut *urban bias* (Lipton, 1977). *Urban bias* adalah suatu deskripsi tentang diskriminasi terhadap sektor pertanian dan wilayah perdesaan. *Urban bias* terjadi akibat kecenderungan pembangunan yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi melalui kutub-kutub pertumbuhan yang semula diramalkan akan memberikan dampak tetesan (*trickle down effect*) kepada kawasan *hinterland*-nya. Yang terjadi malah gejala pengurasan besar (*masive backwash effect*) desa oleh kawasan perkotaan. Dengan perkataan lain dalam ekonomi telah terjadi transfer neto sumberdaya dari wilayah pedesaan ke kawasan perkotaan secara besar-besaran.

Ekses yang terjadi adalah apa yang hingga kini kita lihat sehari-hari: migrasi desa-kota yang tak terkendali, pengkumuhan kota, pengangguran kota dan desa. (Serageldin, 1996).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru untuk memecahkannya. Alternatif solusi atas masalah ini bisa dilakukan dengan cara campur tangan pemerintah dalam bentuk upaya agar proses penciptaan nilai tambah terjadi di tingkat perdesaan itu sendiri. Artinya, kawasan perdesaan harus didorong menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer pangan dan serat, melainkan juga mampu menghasilkan bahan-bahan olahan atau industri hasil pertanian. Namun, penciptaan nilai tambah di tingkat perdesaan sendiri belum cukup menjamin apabila tidak ada jaminan bahwa proses itu dilakukan oleh petani atau dengan peran aktif petani sendiri.

Karena merealisasikan ide ini memerlukan investasi cukup besar oleh pihak perdesaan, dan pada saat yang sama keberadaan modal sulit diharapkan ditingkat perdesaan, akan sulit pula terjadi apabila pelaksanaan tanpa campur tangan pihak luar. Oleh karena itu diperlukan adanya kemitraan antar petani perdesaan, pelaku usaha bermodal dan pemerintah. Pola kemitraan semacam (kemitraan permodalan, produksi, pengolahan, pemasaran,) akan menjamin terhindarnya eksploitasi pelaku usahatani di tingkat perdesaan oleh pelaku usaha lain di satu pihak, dan memungkinkan terjadinya nilai tambah yang bisa dinikmati pelaku usahatani. Ini akan menjamin peningkatan pendapatan. Dan peningkatan pendapatan memungkinkan kawasan perdesaan melakukan investasi baik yang berupa pendidikan, maupun penciptaan lapangan usaha baru. Inilah yang dimaksud dengan dampak ganda (*multiplier effect*) dari penciptaan nilai tambah di tingkat perdesaan.

Dari berbagai alternatif model pembangunan, konsep agropolitan dipandang sebagai konsep yang menjanjikan teratasnya permasalahan ketidakseimbangan perdesaan –perkotaan selama ini. Secara singkat, agropolitan adalah suatu model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan pembangunan kota di wilayah pedesaan, sehingga mendorong urbanisasi (pengkotaan dalam arti positif), yang bisa menanggulangi dampak negatif pembangunan seperti yang selama ini kita saksikan: migrasi desa-kota yang tak terkendali, polusi, kemacetan lalu lintas, pengkumuhan kota, kehancuran massif sumberdaya alam, pemiskinan desa dll. Agropolitan menekankan transformasi desa-desa dengan memperkenalkan unsur-unsur urbanisme ke dalam lingkungan pedesaan yang spesifik. Pendekatan ini bisa mendorong penduduk perdesaan tetap tinggal di pedesaan melalui investasi di wilayah perdesaan. Agropolitan bisa mengantarkan tercapai tujuan akhir menciptakan daerah yang mandiri dan otonom, dan karenanya mengurangi kekuasaan korporasi transnasional atas wilayah lokal. Kepentingan lokal seperti ini akan dapat menjadi pengontrol kekuasaan pusat ataupun korporasi yang bersifat subordinatif.

## II. KERANGKA PENGEMBANGAN AGROPOLITAN

### 2.1 Konsepsi Pengembangan Agropolitan

Sebagai sebuah konsepsi pembangunan kawasan perdesaan, agropolitan dikembangkan oleh Friedman dan Douglas (1975). Agropolitan adalah pendekatan pembangunan kawasan perdesaan (*rural development*) yang menekankan pembangunan perkotaan (*urban development*) pada tingkat lokal perdesaan. Tiga isu utama mendapat perhatian penting dalam konsep ini:

- (1) akses terhadap lahan pertanian dan air,
- (2) devolusi politik dan wewenang administratif dari tingkat pusat ke tingkat lokal, dan
- (3) perubahan paradigma atau kebijakan pembangunan nasional untuk lebih mendukung diversifikasi produk pertanian.

Memperhatikan kota desa sebagai *site* utama untuk fungsi-fungsi politik dan administrasi, pengembangan agropolitan lebih cocok dilakukan pada skala kabupaten (*district scale*). Alasannya, skala kabupaten akan memungkinkan akses lebih mudah bagi rumah tangga atau masyarakat pedesaan untuk menjangkau kota, sementara cukup luas untuk meningkatkan atau mengembangkan wilayah pertumbuhan ekonomi (*scope of economic growth*) dan cukup luas dalam upaya pengembangan diversifikasi produk dalam rangka mengatasi keterbatasan-keterbatasan pemanfaatan desa sebagai unit ekonomi. Selain itu, dengan begitu pengetahuan lokal (*local knowledge*) akan mudah digabungkan dalam proses perencanaan jika proses itu dekat dengan rumah tangga dan produsen pedesaan. Pendekatan agropolitan sangat sesuai dengan semangat desentralisasi (transformasi wewenang dari pusat ke daerah) dan demokratisasi sebagai bagian dari perubahan politik di Indonesia kini. Agropolitan memberikan ruang yang layak terhadap perencanaan pembangunan pedesaan yang mengakomodir dan mengembangkan kapasitas lokal (*local capacity building*) dan partisipasi masyarakat dalam suatu program yang menumbuhkan manfaat timbal balik bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan (Douglas, 1998).

### 2.2 Batasan Teknis Agropolitan

Agropolitan adalah strategi pengembangan kawasan dengan tujuan untuk membangun sebuah agropolis (kota pertanian) yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (Departemen Pertanian (2002)). Agropolis ini disebut kawasan agropolitan. Karena konsep yang mendasarinya adalah konsep spasial, kawasan agropolitan tidak harus identik dengan dengan sebuah kota dalam batasan

administrasi pemerintahan yang kini ada. Adalah dimungkinkan bahwa sebuah kawasan agropolitan meliputi irisan wilayah dari beberapa kota/kabupaten yang berdekatan.

Secara ilustratif kawasan agropolitan digambarkan oleh batasan teknik berikut:

- a. adalah kawasan pertanian yang meliputi distrik-distrik agropolitan;
- b. dengan kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa per km<sup>2</sup>;
- c. berbatas radius maksimal 10 km, sehingga ;
- d. merupakan kawasan yang berpenduduk antara 50.000 – 150.000 jiwa;
- e. selain memfokuskan kegiatan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (untuk menjamin tercapainya keamanan pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan), pengembangan kawasan agropolitan juga mengarah pada terbentuknya kemampuan agribisnis untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Sehingga produk yang dikembangkan harus mempunyai kemampuan daya saing yang kuat.

Keberadaan agropolitan dengan demikian dicirikan oleh berfungsinya sistem agribisnis yaitu sub-sistem pengadaan sarana pertanian (input produksi), sub-sistem produksi, sub-sistem pengolahan, sub-sistem pemasaran dan sub-sistem pendukung, di kawasan agropolitan. Dengan menekankan aspek keberfungsian ini, kawasan agropolitan dapat berupa kota menengah, kota kecil, kota kecamatan, kota pedesaan atau nagari yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Keberadaan pusat pertumbuhan ekonomi ini menjadi faktor pendorong (*push factor*) untuk berkembangnya wilayah-wilayah di sekitarnya, tidak hanya ditinjau dari sudut produksi pertanian namun juga sektor industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan dan lain-lain.

### **2.3. Landasan Hukum**

- a. Kebijakan agropolitan bersumber hukum UUD 1945 khususnya pasal 33.
- b. Selain itu agropolitan juga berlandaskan ketentuan hukum berupa:
  1. Undang Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000 – 2004.
  2. Undang Undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
  3. Undang Undang no. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- c. Peraturan dan Keputusan Pemerintah
  - Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonomi.

### III. SISTEM PENUNJANG/PENDUKUNG

#### 3.1. Unsur-unsur fisik (Sumberdaya Alam dan infrastruktur)

Pembangunan kawasan agropolitan yang berbasis pada wilayah perdesaan sangat berkaitan dengan potensi sumberdaya alam dan kapasitas infrastruktur penunjangnya. Masyarakat perdesaan merupakan masyarakat yang lebih banyak mengandalkan hidupnya pada sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam. Karena itu peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan akan lebih banyak didasarkan pada peningkatan kapasitas sumberdaya alamnya. Peningkatan kapasitas sumberdaya alam tersebut hanya bisa dilakukan apabila infrastruktur penunjang yang tersedia cukup lengkap dan memadai.

#### Arahan Pemanfaatan Fisik Ruang

Pada dasarnya pengembangan kawasan agropolitan merupakan suatu pola pemanfaatan ruang wilayah perdesaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pengembangan sektor pertanian. Karena itu pengembangan kawasan agropolitan harus didasarkan pada kesesuaian agroekologi di wilayah yang bersangkutan. Aspek kesesuaian lahan menjadi penting dalam upaya mewujudkan hasil produksi yang optimal. Hasil produksi yang optimal ini akan tercapai apabila komoditas unggulan yang ditanam didukung oleh kapasitas lahan yang sesuai dengan syarat tumbuhnya.

Selain aspek kesesuaian lahan, aspek alokasi ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) juga cukup penting. Sesuai dengan Undang-undang Penataan Ruang nomor 24 tahun 1992, secara garis besar ruang dapat dibagi menjadi dua yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengembangan kawasan agropolitan tidak boleh dilakukan di kawasan-kawasan dengan fungsi lindung meskipun kawasan tersebut mempunyai kemampuan lahan yang cukup baik.

Aspek berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah aspek penggunaan lahan. Penggunaan lahan ini menjadi penting dalam upaya menentukan secara detail alokasi-alksi ruang yang tersedia bagi pengembangan kawasan agropolitan termasuk infrastruktur penunjangnya. Pengembangan kawasan agropolitan sebisa mungkin tidak mengganggu pola penggunaan lahan yang sudah ada, tapi lebih ditujukan untuk mensinergikan pola penggunaan lahan yang ada dengan pola pengembangan kawasan agropolitan yang akan dikembangkan.

Aspek terakhir yang harus menjadi pertimbangan dalam menyusun arahan pemanfaatan fisik ruang adalah aspek kepemilikan lahan. Pengembangan kawasan agropolitan berbasis pada komoditas unggulan akan sangat terkait dengan upaya untuk meningkatkan *economic of scope* dan

*economic of scale*. Hal ini sangat terkait dengan luasan lahan yang tersedia karena dalam usaha tani luasan lahan akan sangat menentukan kapasitas produksi yang bisa dihasilkan. Semakin besar kapasitas produksi maka kesejahteraan petani akan semakin meningkat. Namun mengingat kepemilikan lahan petani di Indonesia yang dari waktu ke waktu semakin berkurang, maka kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang sistem pemanfaatan dan penguasaan lahan akan sangat diperlukan. Pemerintah bisa membantu dan memfasilitasi terjadinya *land reform* melalui mekanisme-mekanisme kontrak ataupun sewa lahan sehingga dengan demikian penguasaan lahan petani bisa menjadi lebih luas. Penguasaan lahan yang lebih menjamin adanya kepastian selain akan mampu mendorong terjadinya peningkatan produksi juga akan mampu mendorong petani untuk bekerja dengan lebih giat.

Menyusun Rencana Tata Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Kawasan yang bisa menjamin berfungsinya sistem agribisnis dan sistem penunjangnya, sistem layanan umum dan social serta asas asas kelesatarian alam serta menyusun Peta Kawasan pengembangan potensial berdasarkan kelayakan agroekologi.

### **3..2. Penataan Struktur/Hirarki Pusat-pusat aktifitas Sosial-Ekonomi,**

#### **Struktur permukiman**

Dalam pengembangan kawasan agropolitan, struktur permukiman di wilayah perdesaan perlu diperhatikan. Setiap wilayah tentunya akan mempunyai struktur pemukiman yang berbeda. Namun di banyak negara termasuk Indonesia, lokasi permukiman sebagian besar masyarakat perdesaan mempunyai pola menyebar sehingga akan terlalu kecil dan terlalu terisolasi untuk bisa menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan dasar yang memiliki berbagai fungsi seperti di wilayah-wilayah perkotaan.

Dengan struktur permukiman yang demikian, maka akan sangat sulit untuk menentukan satu pusat yang bisa melayani berbagai macam kebutuhan. Karena itu pengembangan kota-kota kecil menengah dapat secara positif mendorong perkembangan dari wilayah *hinterlandnya*, terutama untuk mentransformasikan pola pertanian perdesaan yang subsisten menjadi pola pertanian komersial dan mengintegrasikan ekonomi perkotaan dan perdesaan. Kota-kota kecil menengah ini tidak usah menyediakan segala fasilitas pelayanan, tetapi cukup masing-masing kota mempunyai kapasitas infrastruktur pelayanan tertentu yang satu sama alain bisa saling menunjang. Dengan demikian infrstruktur jalan dan angkutan menjadi penting sebagai penghubung antar setiap lokasi permukiman, sedangkan kota-kota kecil dan menengah bisa menjadi pusat-pusat yang berfungsi menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan dasar.

#### **Struktur sistem produksi pertanian**

Pengembangan kawasan agropolitan harus juga memperhatikan struktur sistem produksi pertanian yang akan dibangun. Dalam hal ini pembangunan

harus bertujuan untuk mendorong terjadinya diversifikasi dalam perekonomian wilayah. Diversifikasi ini bisa mencakup dua hal yaitu **pertama**, diversifikasi komoditas yang diproduksi dan **kedua**, memperbesar tingkat industrialisasi dan penyediaan jasa-jasa pertanian.

Untuk itu diperlukan suatu keterkaitan yang saling menunjang dalam suatu kerangka agribisnis. Pendekatan agribisnis sangat menekankan pada perlunya peningkatan kapasitas dan keterkaitan antar subsistem agribisnis. Subsistem agribisnis ini mencakup subsistem input, produksi (usaha tani), pemanenan, pengolahan dan pemasaran. Keterkaitan ini menjadi penting dalam upaya membentuk struktur sistem produksi pertanian yang efisien dan efektif.

Untuk mewujudkan keterkaitan antar subsistem agribisnis maka pengembangan sistem produksi pertanian di kawasan agropolitan harus ditunjang oleh sarana prasarana dan kapasitas SDM yang memadai. Dari sisi sarana prasarana diperlukan sarana pergudangan dan pengolahan, sarana jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, jaringan irigasi yang bisa meningkatkan suplai air, dan sarana umum seperti telekomunikasi, jaringan listrik, air bersih dan sarana transportasi. Sedangkan dari sisi SDM penguasaan terhadap teknologi dan penelitian menjadi penting. Karena itu harus pula didorong terjadinya proses alih teknologi terutama oleh berbagai lembaga penyuluh pertanian.

### **Struktur Pasar dan sistem informasi**

Struktur pasar dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan juga harus dibenahi. Selama ini petani selalu dirugikan sebagai akibat dari rantai perdagangan yang panjang dan tidak efisien. Selain itu petani juga berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pihak supplier input dan pihak konsumen. Struktur pasar antar petani dengan supplier input bersifat monopoli dimana jumlah petani selaku konsumen banyak sedangkan jumlah pengusaha input sebagai produsen sedikit, sehingga harga input sangat tergantung pada produsen. Sebaliknya struktur pasar output pertanian bersifat monoposoni dimana petani sebagai produsen jumlahnya banyak sedangkan tengkulak sebagai pembeli jumlahnya sedikit sehingga harga lebih banyak ditentukan oleh tengkulak.

Berbagai bentuk struktur pasar seperti ini harus bisa dihindari. Untuk mengatasi rantai perdagangan yang terlalu panjang maka perlu dibangun hirarki pasar mulai dari pasar di tingkat kota-kota kecil menengah yang terkait juga dengan pasar di kota-kota besar. Dengan demikian transaksi produk-produk pertanian tidak akan dikuasai lagi oleh tengkulak, tapi bisa langsung dilakukan transaksi di pasar. Demikian pula posisi tawar petani yang lebih lemah ketika berhadapan dengan produsen input dan konsumen juga bisa diatasi dengan membentuk kelembagaan petani yang bisa lebih meningkatkan peranan petani dalam menentukan harga.

Tapi ini semua membutuhkan suatu sistem informasi yang memadai. Sistem informasi ini penting karena akan sangat mempengaruhi harga komoditas dan mempengaruhi perilaku petani dalam memutuskan komoditas apa yang akan ditanam.

### **3..3. Penataan Jaringan Keterkaitan antar pusat-pusat aktifitas**

#### **Struktur Sistem transportasi**

Struktur sistem transportasi merupakan suatu hal penting dalam pengembangan kawasan agropolitan. Sistem transportasi ini selain digunakan untuk menghubungkan antar lokasi permukiman dengan pusat-pusat pelayanan di kota-kota kecil menengah, juga penting untuk meningkatkan akses dari daerah produksi ke pasar.

Jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan di kota-kota kecil menengah menjadi penting mengingat pola spasial permukiman di wilayah perdesaan yang seringkali tersebar dan terisolasi. Selain itu juga untuk mengatasi masalah akses terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan dasar yang relatif tersebar di beberapa pusat karena tidak ada satu pusat yang bisa menyediakan semua jenis fasilitas pelayanan di wilayah perdesaan.

Sedangkan jalan yang menghubungkan daerah produksi dengan pasar sangat penting untuk mempermudah arus barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain termasuk aliran input-output dalam produksi pertanian. Kelancaran distribusi barang dan jasa dapat mengurangi tekanan kenaikan harga-harga (inflasi) sehingga akan mengurangi biaya produksi baik bagi petani maupun industri pengolahan.

#### **Struktur Sistem informasi dan komunikasi**

Struktur sistem informasi dan komunikasi juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya untuk mengembangkan kawasan agropolitan. Penguasaan terhadap informasi akan mampu meningkatkan posisi tawar petani terutama dalam menentukan harga. Selain itu perilaku petani dalam mengelola usaha taninya juga menjadi lebih efisien dan menguntungkan karena pemilihan komoditas termasuk teknologi penunjangnya bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Sebagai akibatnya akan terjadi efisiensi ekonomi yang di level kawasan hal ini akan mampu memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

### **3.4. Pengembangan Infrastruktur.**

#### **Infrastruktur permukiman**

Pengembangan infrastruktur permukiman menjadi penting selain untuk mencegah terjadinya urbanisasi juga penting untuk membangun akumulasi nilai tambah di dalam wilayah. Dengan infrastruktur permukiman yang memadai orang tidak perlu pergi ke luar wilayah untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping kedua aspek di atas ketersediaan berbagai sarana dan prasarana permukiman ini diharapkan bisa menjadi insentif bagi investor untuk menanamkan modalnya di kawasan agropolitan yang akan dikembangkan.

Dukungan sarana prasarana permukiman ini bisa mencakup telekomunikasi, jaringan listrik, dan sarana transportasi. Namun selain itu perhatian juga perlu diberikan terhadap penyediaan air bersih, perumahan, kesehatan dan jasa-jasa

social di kota-kota kecil menengah untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja.

### **Infrastruktur sistem produksi pertanian**

Pengembangan infrastruktur produksi pertanian juga merupakan suatu hal yang cukup penting. Sarana prasarana yang bisa dikembangkan untuk menunjang pengembangan kawasan agropolitan mencakup pengembangan sarana produksi pertanian (saprota), sarana pergudangan dan pengolahan, sarana jalan dan sarana irigasi.

Sarana produksi pertanian selain dalam bentuk tersedianya pasokan bibit, pupuk, pestisida juga mencakup mesin-mesin dan peralatan seperti traktor dan sebagainya. Sedangkan sarana pergudangan dan pengolahan akan mampu meningkatkan nilai tambah dari produk-produk pertanian yang dihasilkan. Sarana jalan juga penting untuk menekan biaya transportasi dan memudahkan petani untuk melakukan transaksi secara langsung di pasar. Sementara itu sarana irigasi sangat diperlukan terutama bagi daerah-daerah yang kekurangan air dan untuk komoditas-komoditas yang kebutuhan airnya relative tinggi.

Program pembangunan atau pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung secara langsung kegiatan ekonomi di kawasan agropolitan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis kebutuhan :

1. Dukungan prasarana dan sarana dalam menunjang pengembangan industri hulu atau sarana produksi pertanian. Jenis prasarana dan sarannya adalah
  - a. Jalan penghubung antar kota dan desa
  - b. Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian
  - c. Tempat bongkar muat
2. Prasarana dan sarana yang mendukung proses produksi di tingkat usahatani. Jenis prasarana dan sarana yang dibutuhkan meliputi :
  - a. Jalan usahatani untuk mendistribusikan hasil pertanian
  - b. Penyediaan sarana air baku melalui pembuatan embung-embung atau sumur bor, untuk penyiraman budi-daya pertanian dari jenis tanaman-tanaman dan perkebunan.
  - c. Dermaga tempat pendaratan ikan, dan tambatan perahu pada kawasan budidaya perikanan tangkap.
  - d. Sub terminal untuk mengumpulkan hasil pertanian bagi wilayah yang relatif jauh dari pusat pasar atau industri pengolahan
3. Prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan industri hilir. Kegiatan yang perlu dilakukan adalah :
  - a. Sarana pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan.
  - b. Gudang penyimpanan hasil pengolahan, termasuk di dalamnya sarana pengawetan/pendinginan (cold storage)
  - c. Sarana pengolahan hasil pertanian seperti : tempat penggilingan, tempat pengemasan, rumah potong hewan, tempat pencucian dan sortir hasil pertanian, sarana industri-industri rumah tangga termasuk food service,

- seperti : pembuatan keripik, dodol, jus, bubuk/tepung, produk segar supermarket, aero catering dan lain-lain.
- d. Sarana pemasaran dan perdagangan hasil pertanian seperti pasar tradisional, kios cendramata, pasar hewan, tempat pelelangan ikan, sub terminal agribisnis.
  - e. Terminal, pelataran, tempat parkir serta bongkar muat barang, termasuk sub terminal agribisnis.
  - f. Sarana promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis.
  - g. Sarana kelembagaan dan perekonomian seperti bangunan koperasi usaha bersama (KUB), perbankan, balai pendidikan dan pelatihan agribisnis.
  - h. Jalan antar desa-kota, jalan antar desa, jalan poros desa dan jalan lingkaran desa yang menghubungkan beberapa desa hinterland.
  - i. Sarana penunjang lainnya seperti : pembangkit listrik/generator listrik, telepon, sarana air bersih untuk pencucian dan prosesing hasil pertanian, sarana pembuangan limbah industri/sampah hasil olahan.
4. pengembangan prasarana dan sarana tidak hanya terbatas pada tingkat budidaya (on farm). Namun dukungan juga mencakup pengembangan kegiatan pengadaan sarana atau faktor produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran, serta jasa-jasa pendukung lainnya
  5. Penentuan lokasi yang akan digunakan sebagai wilayah produksi harus mengacu kepada prinsip pencapaian skala usaha ( economies of scale).
  6. ketersediaan dan kelengkapan prasarana dan sarana umum merupakan suatu keharusan. Secara langsung fasilitas ini tidak akan mempengaruhi keberhasilan program agropolitan. Namun bagi masyarakat luas adanya fasilitas umum ini akan meningkatkan derajat kesejahteraan (*community welfare*).

### **Infrastruktur Pasar dan sistem informasi**

Infrastruktur pasar dalam pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Pasar yang dibutuhkan yaitu pasar sebagai tempat transaksi fisik bagi input faktor produksi seperti pupuk, obat-obatan dan mesin-mesin pertanian, pasar bagi produksi petani dan pasar bagi produk olahan serta pasar jasa pelayanan bagi masyarakat sekitar wilayah pengembangan agropolitan. Keberadaan pasar sebaiknya cukup terjangkau oleh semua stakeholder atau masyarakat pengguna. Jarak yang terjangkau akan menciptakan insentif ekonomi bagi pemakai untuk bertransaksi. Jarak yang terjangkau baik dekat secara geografis maupun secara jarak tempuh yang pendek karena baiknya sarana jalan akan mengurangi biaya transportasi pemasaran baik pemasaran input maupun output.

### **3.5. Unsur non-fisik/kelembagaan**

#### **Aspek-aspek institusi dan organisasi**

##### **Lembaga keuangan**

Lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi modal. Pada proses awal pengembangan kawasan agropolitan lembaga keuangan yang dibutuhkan adalah lembaga keuangan yang menyediakan dana dengan tingkat suku bunga rendah atau tingkat suku bunga yang tersubsidi. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan tujuan dari pengembangan kawasan agropolitan akan menciptakan surplus pendapatan masyarakat. Agar surplus pendapatan ini memiliki dampak ekonomi tidak saja bagi pemilik surplus pendapatan tersebut namun juga bagi pengembangan sektor ekonomi lainnya, maka surplus pendapatan yang disimpan di lembaga keuangan di wilayah kawasan agropolitan dapat digunakan sebagai salah satu sumber investasi di kawasan tersebut.

##### **Organisasi Petani (produsen) dan pelaku- pelaku usaha**

Organisasi/kelembagaan petani meliputi organisasi/kelembagaan formal maupun non-formal. Lembaga ini akan sangat berperan ketika hubungan antara petani dengan industri pengolahan diformalkan dalam bentuk kemitraan. Dari sudut perusahaan, negosiasi dengan petani secara individu akan meningkatkan biaya transaksi. Dari sudut petani, keberadaan lembaga petani akan memperkuat posisi petani dalam melakukan kontrak jual dengan perusahaan. Lembaga petani ini dapat berfungsi sebagai media pertukaran informasi sesama petani, khususnya informasi yang berhubungan dengan teknik budidaya pertanian dan perkembangan harga-harga, baik harga input maupun output.

##### **Peran pemerintahan**

Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah agropolitan, peranan dari pemerintah adalah untuk memberikan proteksi, menyelenggarakan pembangunan, melaksanakan fungsi fasilitasi, regulasi dan distribusi. Contohnya, pengembangan pertanian, terutama dalam upaya transfer teknologi atau aplikasi teknologi, maka lembaga penyuluh pertanian seperti Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai lembaga konsultasi masalah pertanian dapat menjadi sumber informasi bagi para petani, tempat percontohan usaha agribisnis yang lebih efisien dan menguntungkan. Selain itu, dengan diberikannya otonomi kepada wilayah-wilayah agropolitan, maka kemungkinan terjadinya konflik antar wilayah akan menjadi lebih tinggi sehingga peranan pemerintah dalam melakukan manajemen konflik menjadi suatu hal yang cukup penting.

## IV. PERAN STAKEHODERS

### Pembagian Peran antar Pihak.

Keunggulan komparatif dan kompetitif yang menjadi landasan pengembangan suatu wilayah menjadi kawasan agropolitan ditentukan oleh faktor faktor berikut:

1. faktor alamiah wilayah dalam bentuk agroklimat yang layak mendukung pengembangan komoditas unggulan,
2. faktor harga relatif yang baik dari produk–produk berbasis komoditas unggulan terhadap produk non pertanian,
3. faktor keterkaitan yang baik dengan sektor ekonomi lain,
4. faktor dukungan administratif kewenangan dalam bentuk peraturan, hukum, dan perundang-undangan ekonomi dalam hal persaingan (pasar) sehat, struktur usaha, dan kesejahteraan sosial.
5. faktor kesejarahan, kapasitas dan kekhasan sosio-kultural masyarakat (misalnya jiwa dagang dan kewirausahaan, semangat atau etos kerja, *paguyuban* ekonomi dll.) yang bisa didayagunakan sebagai modal sosial.

Terbentuknya kawasan agropolitan harus dilandasi oleh kepastian bahwa kelima faktor tersebut layak berada di kawasan yang dicalonkan untuk dikembangkan. Prinsip ini tidak bisa dilanggar atau diabaikan. Pengabaian hanya akan menyebabkan pemborosan sumberdaya pembangunan dan karenanya pengulangan kesalahan pembangunan yang sama dengan praktek pembangunan yang mau dikoreksi.

Meskipun demikian, mengingat pola capaian pembangunan di Indonesia tidaklah merata di semua wilayah, sangat mungkin terjadi bahwa suatu kawasan yang secara agroklimat sangat layak untuk dikembangkan bisa tidak terpilih karena pra-syarat lain tidak terpenuhi. Hal ini misalnya berlaku untuk kawasan Indonesia Timur. Oleh karena itu, untuk penentuan pilihan kawasan agropolitan di kawasan ini diperlukan pelonggaran kriteria. Dalam hal ini, kriteria kelayakan agroklimat dan pasar masih tetap berlaku, sementara kriteria ke 3 sampai dengan 5 bisa dilonggarkan. Dengan demikian terbuka kemungkinan bagi kawasan Indonesia Timur untuk terpilih sebagai kawasan pengembangan agropolitan.

Sementara beberapa faktor bisa bersifat *given*, faktor lain bisa diupayakan pencapaiannya agar bisa mendukung terbentuknya sebuah kawasan agropolitan. Upaya ini tidak bisa diserahkan ke salah satu *stakeholder* saja, melainkan harus dicapai dengan semangat sinergi dari sebuah kemitraan. Dengan memperhatikan kompetensi masing masing *stakeholders* pencapaian sinergi bisa dilakukan melalui pembagian tugas secara konsisten, dalam arti bahwa pembagian tugas dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maupun sifat masing masing *stakeholders*.

Semangat dasar dari kebijakan agropolitan ini adalah proses penciptaan nilai tambah di kawasan perdesaan oleh masyarakat sendiri. Pelaksanaan kebijakan tanpa keterlibatan masyarakat dalam arti yang sesungguhnya (yaitu terutama

melalui peran perekonomian yang nyata) pada hakekatnya melukai semangat dasar konsep agropolitan ini, karena hal itu hanya mengulangi kesalahan pembangunan yang telah diterapkan selama ini. Oleh karena pelaksanaan pembangunan tidak bisa dijalankan oleh masyarakat perdesaan itu sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian depan, maka dipilih pola kemitraan dalam seluruh tahap pembangunan, dari perencanaan, pelaksanaan dan implementasinya. Kemitraan adalah strategi aliansi bisnis yang dilakukan lebih dari dua pihak dengan prinsip saling membutuhkan, menguntungkan, memperkuat, serta memiliki kesetaraan antar pihak yang bermitra dengan mengandalkan prinsip kesetiaan, transparansi, bermanfaat & menguntungkan. Kemitraan dimaksud melibatkan pihak masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Kemitraan menuntut dukungan institusi kemitraan gabungan semua *stakeholders* terkait sebagai refleksi dari kebersamaan *public-private-community patnership*.

Atas dasar hal tersebut maka pembagian peran bisa dijelaskan sebagai berikut.

#### **4.1 Peran Pemerintah Kabupaten/Kota.**

1. Mewakili daerahnya mengajukan usulan pengembangan agropolitan berdasarkan data potensi wilayah yang akurat.
2. Aktif memobilisasi dan mewujudkan potensi kemitraan antar pelaku usaha potensial (swasta dan masyarakat, LSM), dan antar cabang-cabang kegiatan ekonomi (perbankan, layanan informasi dan riset pasar, agen promosi dll.) yang ada di wilayahnya. Termasuk di dalam tugas ini adalah memobilisasi potensi kemitraan antar kabupaten atau kota yang berdekatan.
3. Aktif menyediakan anggaran pembangunan.
4. Bekerjasama dengan pemerintah pusat menyediakan infrastruktur (terutama jaringan jalan, irigasi, prasarana usaha, prasarana pemerintahan dll) di kawasan.

#### **4.2. Pemerintah Provinsi**

1. Terutama Menjadi fasilitator bagi terjalinnya komunikasi dan sinergi antar kawasan yang menjamin diterapkannya asas spesialisasi kawasan agropolitan di wilayahnya.
2. Membantu memobilisasi dan memotivasi pihak swasta daerah maupun nasional untuk ikut serta melakukan investasi di kawasan calon pengembangan, dengan menunjukkan insentif ekonomi yang jelas terhadap mereka.
3. Menyediakan layanan promosi untuk kawasan maupun produk-produk kawasan agropolitan.

### 4.3. Peran Pemerintah Pusat .

Memberikan perangkat kriteria rasional dan obyektif yang dijadikan acuan nasional dalam penentuan wilayah pengembangan agropolitan. Ini diperlukan untuk menghindari pemborosan sumberdaya akibat penerapan semangat *bottom up* yang berlebihan dan salah arah, dicirikan oleh proses penentuan daerah pengembangan yang tidak mengikuti kriteria penuh.

Peran pemerintah pusat dijalankan oleh berfungsinya departemen dan lembaga di tingkat pusat yang terkait dengan pengembangan kawasan. Karena sifatnya yang multidepartemental, pengembangan kawasan agropolitan menuntut adanya koordinasi antar departemen yang bisa menjamin alokasi sumberdaya pembangunan secara efektif efisien. Efektif ditunjukkan oleh berperannya departemen sesuai tugas pokok dan fungsinya, efisien berarti dijalankannya tugas dan fungsi itu secara hemat. Pengembangan kawasan agropolitan setidaknya menuntut keterlibatan aktif 10 Departemen /instansi dengan rentang tugas dan bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Rentang Tugas dan Peran Departemen dan Instansi dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan**

No.	Departemen/Instansi	Rentang Peran dan Tugas
1	Dalam negeri	Pemberdayaan
2	Pertanian	Terjaminnya ketahanan pangan, dan pasokan bahan baku yang akan diolah.
3	Kehutanan dan perkebunan	Pengelolaan sumberdaya alam
4	Perdagangan dan industri	Kegiatan produksi perdesaan
5	Kelautan dan Perikanan	Kegiatan pengamanan pantai & perikanan tambak
6	Kesehatan	Kegiatan kualitas air baku & lingkungan permukiman
7	Lingkungan hidup	Kelestarian lingkungan
8	Koperasi	Kegiatan perkoperasian
9	BPPT	Penerapan teknologi perdesaan
10	BPN	Kegiatan penerbitan kepemilikan lahan

Dalam kaitannya dengan kegiatan agribisnis di kawasan agropolitan diperkirakan rentang tugas dan peran departemen dan instansi adalah sebagai berikut (Tabel 4)

**TABEL 4**  
**Rentang Peran Departemen / Instansi sehubungan dengan Aktivitas**  
**Agribisnis dan Kegiatan Ekonomi Lain**

	<b>Macam Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Deptan
2	Pertanian tanaman sayuran dan tanaman hias	Deptan
3	Kehutanan	Dephutbun
4	Perkebunan	Dephutbun
5	Peternakan	Deptan
6	Perikanan darat, pertambahan dan perikanan laut	Dept. Kelautan & Perikanan
	<b>Industri Kerajinan</b>	
7	Industri kecil	Deprindag
8	Kerajinan rakyat	Deprindag
	<b>Pariwisata</b>	
9	Agro wisata/wana wisata	Meneg Parsenibud
10	Eko wisata	Meneg Parsenibud
11	Wisata budaya	Meneg Parsenibud
12	Wisata kesenian	Meneg Parsenibud
	<b>Pemanfaatan sumberdaya alam</b>	
13	Pertambangan rakyat	Deptamben
14	Galian golongan C masyarakat	Deptamben
	<b>Usaha Penyediaan Bahan Masukan</b>	
15	Bahan baku impor untuk proses pengolahan	Deperindag
16	Bahan pembantu untuk proses pengolahan	Deperindag
	<b>Usaha Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Untuk Pengolahan</b>	
17	Mesin pengolahan	Deperindag
18	Mesin perlengkapan pengolahan	Deperindag
19	Pabrik pengolahan komoditas primer menjadi barang jadi / setengah jadi	Deperindag
20	Perdagangan hasil-hasil komoditas dan barang jadi / setengah jadi	Deperindag
21	Distribusi bahan-bahan masukan dan barang-barang hasil olahan	Dephub
22	Jasa-jasa lainnya.	Dephub

#### **4.4. Peran Masyarakat**

1. Memberikan respon baik terhadap prakarsa kemitraan.
2. Ketersediaan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi potensi lokal dan upaya pengembangan kapasitas sebagai prasyarat pembangunan.
3. Terlibat langsung dalam pembentukan forum kemitraan dengan para stakeholders lainnya.
4. Memberikan kontribusi dalam pembiayaan pengembangan agribisnis khususnya dalam tahap pengembangan lebih lanjut.
5. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme bottom-up (partisipatif).
6. Melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung atas program yang sedang berlangsung. Dengan demikian akan terbentuk mekanisme rasa memiliki dari masyarakat di mana program agropolitan dikembangkan.
7. Khusus bagi masyarakat petani/peternak/pekebun/nelayan terlibat dalam pembentukan kelompok tani agar kebutuhan bersama dapat diakomodasi serta mempermudah transfer dan diseminasi teknologi serta mempermudah arus komunikasi.
8. Bagi kelompok masyarakat LSM dan jurnalis diharapkan perannya dalam mensosialisasikan program pengembangan kawasan agropolitan. Disamping perannya sebagai alat kontrol pelaksanaan program setelah dibuat kesepakatan bersama dalam forum kemitraan.

#### **4.5. Peran Swasta**

1. Melakukan investasi sesuai dengan potensi kawasan.
2. Bermitra dengan pelaku usaha masyarakat lain sesuai dengan insentif yang bisa dilihatnya.
3. Berperan aktif dalam pembentukan forum kemitraan
4. Penggerak percepatan program pengembangan kawasan agropolitan, khususnya pada tahap-tahap pengembangan selanjutnya.
5. Menyerap hasil produksi pertanian/perikanan/perkebunan dengan mekanisme pembentukan harga yang disepakati. Pembentukan harga diupayakan dalam bentuk contract-farming sehingga petani terhindar dari perubahan fluktuasi harga di pasar domestik dan pasar internasional.
6. Melakukan bimbingan teknis dan manajemen kepada petani atau kelompok tani dalam upaya memperbaiki kualitas manajemen usahatani. Dengan cara ini diharapkan mutu produksi pertanian dapat ditingkatkan.

## V. PENGELOLAAN AGROPOLITAN

### 5.1 Pengorganisasian.

Untuk memperlancar program pengembangan kawasan agropolitan sebaiknya dibentuk lembaga pengelola kawasan yang terlepas dari struktur pemerintahan yang ada. Secara teoritis syarat pengembangan kawasan agropolitan adalah struktur politik yang lebih otonom. Pembentukan lembaga pengelola bertujuan untuk lebih menfokuskan kepada permasalahan pengembangan kawasan agropolitan. Bentuk lembaga pengelola sebaiknya bersifat otonom (memiliki otoritas luas). Dengan pola otoritas ini rencana pengembangan dan pembangunan kawasan agropolitan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, efektif, terintegrasi dan komprehensif. Pola otoritas sangat fleksibel terhadap penyesuaian visi dan misi yang akan dikembangkan.

Untuk lebih memperkuat posisi lembaga otoritas ini sebaiknya dibentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA). Tujuan lembaga pengelola ini adalah menstimulasi percepatan pengembangan kawasan agribisnis, mempercepat proses pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi lokal, dan mempercepat proses perencanaan dan penataan kawasan agribisnis.

Tugas dari lembaga otoritas ini adalah :

- Melakukan penataan (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian) Kawasan Agropolitan
- Menginventarisasi kepemilikan lahan untuk pengelolaan perusahaan lahan. Dalam jangka panjang sudah harus mempertimbangkan kebijakan agrarian sehingga terdapat kejelasan kepemilikan lahan bagi petani. Dua alternatif yang dapat dikembangkan, yaitu agrarian reform dan land titling. Dengan status kepemilikan jelas memungkinkan petani memiliki akses ke lembaga keuangan.
- Mengingat pengembangan kawasan agropolitan harus mempertimbangkan daya dukung alam maka lembaga otoritas ini harus selalu melakukan audit lingkungan dan analisis dampak lingkungan dari proses produksi baik yang dilakukan oleh petani maupun industri. Khususnya pertanian analisis dampak lingkungan akan berguna untuk mempertahankan kualitas tanah dan mengurangi kandungan unsure kimia beracun pada komoditi pertanian.
- Sebagai fasilitator dan katalisator pengembangan sistem agribisnis di kawasan agropolitan.
- Memfasilitasi masyarakat agar mempunyai akses yang lebih luas terhadap teknologi, kemitraan usaha dan lembaga keuangan.
- Memberikan informasi pasar kepada masyarakat
- Mendorong terbentuknya lembaga ekonomi petani seperti kelompok petani, kelompok usaha dan koperasi berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat dalam rangka pembedayaan ekonomi rakyat.

- Memfasilitasi pembentukan kerjasama atau kemitraan antara masyarakat (petani), pemerintah daerah dan pihak swasta.
- Mengembangkan pusat pelatihan dan penelitian
- Merumuskan dan menetapkan program kerja dan anggaran pengembangan (business and investment plan)
- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan kawasan agropolitan.

## 5.2 Disain Program.

Agar tujuan pengembangan kawasan agropolitan dapat dicapai sesuai dengan rencana, diperlukan penentuan perumusan program. Program-program yang akan dikembangkan harus mengacu kepada visi dan misi pengembangan agropolitan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Program yang akan dikembangkan harus berdasarkan penilaian kebutuhan (*needs assessment*). Untuk mendukung penyusunan program-program yang akan dikembangkan sebaiknya melibatkan tim ahli/teknis dan forum stakeholder. Penyusunan program sebaiknya dibedakan berdasarkan waktu pencapaian: program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Tujuan dan target penyusunan program sebaiknya dapat terukur. Agar program yang dilaksanakan mencapai tujuan maka diperlukan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim ahli/teknis dan forum stakeholder.

**Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).** Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya mencakup pemerintahan dalam arti politik namun mencakup pengelolaan badan pengelola agropolitan. Dalam rangka menciptakan lingkungan kemitraan yang kondusif maka pengelolaan kawasan agropolitan harus transparansi, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu perlu dibuat mekanisme pengawasan oleh forum stakeholders.

### **Menciptakan daya saing.**

Jenis peraturan yang menghambat investasi swasta di kawasan agropolitan sebaiknya dihilangkan, diganti dengan kebijakan yang pro investasi. Penghilangan kebijakan yang anti investasi bukan berarti menghambat peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam jangka panjang perkembangan ekonomi kawasan agropolitan secara langsung berdampak terhadap pertumbuhan daerah di mana kawasan agropolitan berada. Pihak pengelola juga harus memperhatikan bentuk-bentuk tindakan yang akan menciptakan ekonomi biaya tinggi.

### **Peningkatan partisipasi stakeholder.**

Peningkatan dan penguatan partisipasi stakeholder khususnya dari pihak swasta dan petani diharapkan tidak terjadinya kebijakan yang bias terhadap satu kelompok. Dengan penguatan partisipasi stakeholder akan mendorong

penguatan posisi bersaing (bargaining position) khususnya posisi petani. Dampak lain dari penguatan partisipasi stakeholder adalah pengurangan kegagalan dan distorsi pasar (*market failure and distortion*).

#### **Pengembangan informasi pasar.**

Harus diakui bahwa sebagian besar petani tidak memiliki akses yang luas terhadap informasi pasar. Dampaknya adalah ketidakmampuan memprediksi harga produk sehingga harga yang diterima selalu rendah.

### **5.3. Pembiayaan.**

Secara prinsip pembiayaan pengembangan kawasan agropolitan harus berasal dari masyarakat di kawasan pengembangan sesuai dengan paradigma partisipasi masyarakat. Mengingat dalam tahap awal pengembangan kawasan agropolitan membutuhkan dana investasi maka terdapat beberapa alternatif pembiayaan pengembangan agropolitan

- (2) Pembiayaan secara vertikal. Pemerintah pusat memiliki kontribusi yang paling besar dalam pengembangan kawasan agropolitan. Kontribusi yang besar diharapkan menjadi faktor penggerak dalam pengembangan kawasan agropolitan. Besarnya bagian pemerintah pusat cq. Departemen Pertanian, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Dalam Negeri disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Pada tahap awal kontribusi pemerintah propinsi dan daerah/kota berfungsi sebagai pelengkap. Namun pada tahap pengembangan selanjutnya, peran pemerintah pusat dapat dikurangi dan kontribusi pemerintah propinsi atau daerah/kota diharapkan semakin meningkat. Dana yang bersumber dari pemerintah digunakan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pengembangan system jaringan irigasi, jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan pasar komoditi pertanian.
- (3) Mengingat investasi di bidang pertanian memiliki resiko yang cukup besar sehingga kurang menarik minat pelaku bisnis diperlukan kebijakan investasi di bidang pertanian yang meliputi : (a) penyediaan kredit investasi jangka panjang, (b) penyediaan modal awal (seed capital) yang dapat dikembalikan secara bertahap setelah petani/perusahaan agribisnis tumbuh mandiri, (c) pengembangan modal ventura, sebagai mitra usaha bagi petani atau perusahaan agribisnis di kawasan pengembangan agropolitan, dan (d) pengembangan lembaga perkredian dan bank khusus yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan.
- (4) Pembiayaan secara horisontal. Sumber pembiayaan lainnya dapat bersumber dari kontribusi masyarakat dan pihak swasta. Sumber pembiayaan lainnya dapat bersumber dari pihak lain seperti donor dan lembaga bantuan keuangan.

Implikasi dari bentuk pembiayaan di atas adalah tersedianya lembaga keuangan yang dapat mudah diakses oleh para petani atau industri pengolahan pertanian.

Pembiayaan ini dapat berupa pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan tersebut atau dana pemerintah baik pusat, propinsi atau daerah. Lembaga keuangan hanya berfungsi sebagai media intermediasi. Jika pola kedua dilaksanakan maka pemerintah dapat memberlakukan tingkat suku yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga bank-bank yang ada.

#### **5.4. Promosi dan Kemitraan**

Keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan yang berbasis komoditi unggulan sangat tergantung kepada strategi promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau badan/lembaga pengelola kawasan agribisnis yang didukung oleh pelaku bisnis di kawasan tersebut. Penentuan produk unggulan harus berdasarkan tidak hanya kelayakan dari sudut budidaya atau agroklimat namun harus memenuhi kelayakan budaya dan kelayakan pasar. Penentuan komoditi unggulan berdasarkan syarat kelayakan tersebut dimaksudkan untuk menghindari alokasi sumberdaya ke sektor yang tidak memiliki nilai tambah dan dampak pengganda bagi ekonomi di kawasan agropolitan. Diharapkan pengembangan komoditi unggulan yang didukung oleh industri pengolahan produk pertanian tidak hanya memasok kebutuhan wilayah sekitar kawasan agropolitan namun produk olahan yang dipasarkan ke daerah lain akan menjadi ciri khas daerah tersebut.

Pada tahap awal pengembangan kawasan agropolitan di mana industri pengolahan belum berkembang pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan dalam mempromosikan produk pertanian yang dihasilkan di wilayahnya. Demikian pula produk olahan yang masih rendah proses pengolahannya, pemerintah daerah dan atau perusahaan milik pemerintah (BUMN/BUMD) dapat memberikan dukungannya dalam memasarkan produk olahan tersebut. Dalam kaitan ini proram kemitraan harus sudah menjadi progam prioritas badan/lembaga pengelola kawasan agropolitan.

Prinsip dasar yang harus dibangun dalam pengembangan kemitraan adalah kesetaraan, transparansi dan kemanfaatan yang saling menguntungkan. Kemitraan yang dikembangkan akan berfungsi sebagai wahana pertukaran informasi dan koordinasi antar stakeholder, memberikan mekanisme untuk memberikan keterampilan, kompetensi dan kepentingan stakeholder, menggalang dan memobilisasi sumberdaya yang lebih banyak, menciptakan kesadaran yang lebih mendalam, dan menciptakan dan mengembangkan jaringan yang lebih dinamis. Karena forum kemitraan mencakup semua stakeholder pengembangan kawasan agropolitan maka kemitraan merupakan bentuk public-private-community partnership sehingga memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

## VI. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. pengembangan kawasan agropolitan harus berbasis kemitraan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat petani. Pihak pemerintah hanya sebatas motivator dan fasilitator bagi pihak swasta dan masyarakat petani.
2. Pembentukan kelompok tani merupakan bentuk pemberdayaan para petani dalam melakukan kegiatan baik kegiatan pengadaan sarana produksi, pengelolaan usahatani dan penjualan hasil pertanian.
3. Pembentukan forum kemitraan atau forum stakeholder juga harus disertai dengan pembentukan legal aspek seperti AD/ART.
4. Untuk menghindari kerugian petani/pekebun/peternak/nelayan dari fluktuasi harga baik fluktuasi harga di pasar domestik dan pasar internasional, pembentukan harga beli ke petani sebaiknya menggunakan mekanisme *contract farming* dengan industri pengolahan
5. Dalam hal volume kredit yang dibutuhkan sangat besar dan tidak mungkin mampu dipenuhi oleh lembaga keuangan tingkat daerah atau regional pemerintah daerah dapat menyediakan dana dan menyalurkannya melalui lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan milik pemerintah daerah.

### B. Saran

1. Program yang perlu dikembangkan adalah land titling (kepastian hak atas tanah).
2. pemerintah hendaknya menyiapkan keberadaan lembaga keuangan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses modal
3. Pemerintah hendaknya menciptakan kemudahan pencarian pasar baru bagi pengusaha pengusaha baru yang belum mempunyai sistem jaringan pemasaran pasti. Promosi baik di tingkat internasional, regional dan provinsi sesuai dengan potensi pasar komoditas yang dikembangkan di kawasan agropolitan. Promosi juga dapat dilakukan melalui perwakilan-perwakilan pemerintah RI di luar negeri
4. Bentuk-bentuk intervensi pemerintah seyogyanya tidak melanggar kesepakatan-kesepakatan multilateral seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASIAN PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC) dan WORLD TRADE ORGANISATION (WTO).
5. Memberikan insentif bagi petani, industri kecil dan menengah dan industri pengolahan berupa pajak/subsidi, suku bunga, investasi, ketenaga kerjaan, serta sistem imbalan terhadap tenaga kerja agar upah yang diterima tidak hanya menutupi kebutuhan dasar melainkan juga punya potensi untuk mengadakan permintaan barang dan jasa sekunder

## DAFTAR PUSTAKA

[www.bangnak.ditjennak.go.id/dir/dis2.ppt](http://www.bangnak.ditjennak.go.id/dir/dis2.ppt)

[http://rudyct.tripod.com/sem2\\_023/deddy\\_e\\_r.htm](http://rudyct.tripod.com/sem2_023/deddy_e_r.htm)

[www.kimpraswil.go.id/Ditjen\\_kota/ARSIP-BERITA/Agropolitan.htm](http://www.kimpraswil.go.id/Ditjen_kota/ARSIP-BERITA/Agropolitan.htm)

[www.kimpraswil.go.id/Ditjen\\_kota/Agropolitan/indeks.htm](http://www.kimpraswil.go.id/Ditjen_kota/Agropolitan/indeks.htm)

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/03/lebaran/716903.htm>

Friedmann, J. and M. Douglass (1975), "Agropolitan Development: Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia." In: United Nations Centre for Regional Development, *Growth Pole Strategy and Regional Development Planning in Asia*.

Friedmann, J. (1973), *Urbanization, Planning and National Development*. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications.

Pearce, D. (1988), "The Sustainable Use of Natural Resources in Developing Countries." In: R. K. Turner (ed.), *Sustainable Environmental Management*. London: Belhaven Pre

Anonymous, 2003. Hortikultura. Direktorat Pengembangan Usaha Hortikultura. Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura. Departemen Pertanian R.I. Jakarta.

Anonymous, 2002. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan agropolitan. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Departemen Pertanian R.I. Jakarta.